

ABSTRAK

Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Oleh : Olinia Disa Cleopatra

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang adalah proses pengurusan pelayanan pertanahan dimana waktu dan biaya pelayanan tidak sesuai dengan dengan peraturan yang ada.. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang, mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi bentuk-bentuk penyimpangan pada pelayanan publik pada pendaftaran tanah secara sporadik di kantor pertanahan kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara sampel purposive (*purposive sampling*). Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kota Padang belum berjalan dengan baik. Ada beberapa alasan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan Peraturan KaBPN Nomor 1 Tentang Standar Pelayanan Pertanahan: (1) Kekuatan tenaga/petugas yang ada hanya 8 (delapan) orang petugas ukur dengan cakupan wilayah 1(satu) Kota Padang; (2) tidak semua lahan yang diukur layak ukur, maksudnya setiap tanah yang akan diukur tanda batasnya harus ada. Upaya didalam mengatasi kendala tersebut adalah diantaranya BPN telah mulai menggunakan alat canggih seperti GPS di dalam proses pengukuran kegiatan pertanahan, demi tercapainya pelayanan publik yang prima.